

Usulan Tarif Integrasi Transportasi DKI Disetujui

16 kelompok masyarakat diusulkan mendapat fasilitas gratis tiket antarmoda.

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan tarif integrasi antarmoda transportasi umum LRT, MRT, dan Transjakarta dengan nominal sebesar Rp 10 ribu. Persetujuan tersebut menyertakan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI.

“Komisi B menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail di Gedung DPRD DKI di Jakarta, Selasa (7/6).

Ismail menyakini tarif integrasi tiga moda transportasi umum tersebut bakal menggeser pola masyarakat menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Namun, dia mengatakan, persetujuan itu belum sampai tahap finalisasi, tetapi hal itu membutuhkan masukan dari legislatif dan eksekutif.

“Jadi, bukan setelah saya bacakan kemudian final, tapi ini seharusnya buka ruang untuk menyempurnakan draf ini,” ucapnya.

Meski menyetujui usulan integrasi tarif termasuk besaran tarif sebesar Rp

10 ribu itu, pihaknya menginginkan ada evaluasi setiap tiga bulan selama satu tahun. Tujuannya, kata dia, untuk mengetahui dampak implementasi tarif integrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal.

Komisi B DPRD DKI juga merekomendasikan Pemprov DKI dan BUMD bidang jasa transportasi massal untuk mencatat jumlah pengguna integrasi tarif itu yang juga setiap tiga bulan dalam satu tahun dengan pemisahan warga KTP DKI dan non-KTP DKI



Jika masyarakat menggunakan layanan untuk tiga moda ini maka mereka cukup bayar Rp 10 ribu saja,

Jakarta.

Terakhir, lanjut politisi PKS itu, diharapkan ada fasilitas gratis tiket integrasi terhadap 16 kelompok masyarakat di DKI. Adapun 16 kelompok masyarakat itu di antaranya PNS DKI, pensiunan PNS DKI, tenaga kontrak DKI, penerima Kartu Jakarta Plus (KJP). Kemudian, karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, warga KTP Kepulauan Seribu, penerima beras miskin, anggota TNI-Polri, veteran, penyandang disabilitas, warga lanjut usia, marbot masjid dan mushala, PAUD, jumantik, hingga PKK.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali, menilai, tarif integrasi transportasi DKI bisa mengefisiensikan mobilitas pengguna. Hal itu, kata dia, karena tarif satu harga integrasi bisa menarik lebih banyak pengguna transportasi angkutan massal.

“Integrasi tarif Jaklingko tidak mengubah tarif angkutan massal existing. Justru bisa lebih kompetitif dan menarik minat masyarakat,” kata Marullah.

Menurut dia, dengan adanya tarif integrasi nanti, penambahan subsidi pada MRT, LRT, dan Transjakarta juga akan naik. Meskipun, dia memproyeksikan nilai subsidi tidak terlalu membebani.

“Tambahan subsidi untuk MRT, LRT, dan T.J totalnya sekitar Rp 4.848

miliar,” katanya.

Jumlah itu, dinilainya naik sekitar 0,3 persen dari total subsidi tahun lalu senilai Rp 3,8 triliun. Oleh karena itu, dia berharap para pimpinan Komisi B DPRD DKI Jakarta bisa segera menyetujui dan mengesahkan usulan integrasi tarif antarmoda transportasi itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pihaknya berencana untuk menerapkan tarif integrasi transportasi itu pada akhir Juni 2022. Menurut dia, penerapan integrasi tarif perlu dipercepat karena sudah ditunggu banyak warga. Penerapan tarif integrasi akan diuji coba terlebih dahulu selama dua pekan.

“Setelah menerima persetujuan kami langsung memproses Keputusan Gubernur. Kami harapkan akhir Juni sudah dieksekusi ya,” kata Syafrin.

Ia mengharapkan, usulan itu dapat segera disetujui DPRD DKI untuk penetapan tarif di tiga moda transportasi massal itu. “Jika masyarakat menggunakan layanan untuk tiga moda ini, mereka cukup bayar Rp 10 ribu saja,” tutur Syafrin.

Setelah Komisi B DPRD DKI menyetujui rekomendasi tarif integrasi tiga transportasi massal itu, maka agenda selanjutnya akan dibahas para pimpinan DPRD DKI Jakarta.

■ antara ada nur aini